



Dugaan Korupsi Dinas Pendidikan DKI Kerugian Negara Capai Rp 227 Miliar

Ada persekongkolan antara pejabat pembuat komitmen, distributor, peserta, dan pemenang lelang. Anggota DPRD diduga terlibat.

JAKARTA — Pegiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014. "Anggarannya di-*mark up*. Kebanyakan barangnya tidak bisa digunakan," kata Firdaus Ilyas, dari Badan Pekerja ICW, setelah melaporkan dugaan korupsi itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta Selatan kemarin.

Ia dan timnya menemukan indikasi korupsi dalam pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS), printer 3 dimensi, pemindai (*scanner*), dan enam judul buku untuk sejumlah sekolah di DKI. Dari dugaan korupsi empat proyek di atas, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 277,9 miliar. Rinciannya, kerugian pengadaan UPS sebesar Rp 186,4 miliar; kerugian pengadaan printer dan *scanner* Rp 89,4 miliar; serta kerugian pengadaan enam judul buku Rp 2,1 miliar.

Menurut ICW, dalam pembelian UPS diduga ada persekongkolan antara pejabat pembuat komitmen (PPK), distributor, peserta, dan pemenang lelang. Kongkalikong ini terkait dengan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), penawaran harga, dan penetapan pemenang lelang. Modusnya, dalam penetapan lelang, PPK menggunakan harga distributor yang justru menjadi pemasok dan pemenang lelang. ICW menduga nilai HPS telah di-*mark-up* setinggi mungkin sehingga menguntungkan distributor dan pemenang lelang.

Wakil Ketua KPK sementara, Johan Budi S.P., mengatakan

pihaknya akan memproses laporan ICW tersebut. "Setiap laporan akan diproses melalui telaah laporan," ujarnya, kemarin.

Kasus dugaan korupsi pembelian UPS juga tengah disidik oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri. Juru bicara Polri, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan, dalam pembelian UPS, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 50 miliar.

"Hasil audit dalam *mark-up* anggaran, ada kerugian negara Rp 50 miliar dan bertambah karena kami terus memeriksanya," kata Rikwanto, Selasa lalu. Dia mengatakan penggelembungan anggaran UPS terjadi saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan DKI Jakarta 2014. Menurut Rikwanto, ada anggota DPRD dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat serta Jakarta Utara yang memasukkan anggaran UPS sebesar Rp 300 miliar untuk 49 paket ke sekolah-sekolah.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan telah menyerahkan semua kasus ini ke KPK dan polisi. "Saya akan pastikan, selama saya menjadi gubernur, tak ada satu sen pun yang bisa dicuri," kata Ahok.

● LINDA TRIANITA | SINGGIH SOARES | LINDA HAIRANI



Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan berkas terkait dengan dugaan korupsi APBD DKI Jakarta tahun 2014 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, kemarin. ICW melaporkan indikasi dugaan korupsi pengadaan barang dalam APBD DKI 2014 dan mendesak KPK untuk memperluas kasus itu, terutama untuk mata anggaran yang diajukan DPRD.